

MENYOAL GENERASI MUDA: Dimana Orang Muda Kepulauan Riau Pasca 2002?¹

Wayu Eko Yudiatmaja²

Pengantar

Terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau melalui jalan yang panjang dan berliku. Pada awalnya, provinsi ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang sudah terbentuk sejak tahun 1958 berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 1958. Waktu itu, Provinsi Riau masuk dalam Provinsi Sumatera Tengah, yang beribukota di Bukittinggi. Provinsi Riau sendiri terdiri dari Daerah Tingkat Dua Kepulauan Riau, Bengkalis, Kampar, Indragiri, dan Kotapraja Pekanbaru. Jalan bagi lahirnya Provinsi Kepulauan Riau dirintis karena adanya kesadaran bersama akan pentingnya otonomi penuh bagi Kepulauan Riau. Munculnya kesadaran dari masyarakat Kepulauan Riau untuk membentuk provinsi yang otonom dan terlepas dari Provinsi Riau dikarenakan ketimpangan pembangunan antara Riau Daratan dan Kepulauan Riau. Bahkan, ibukota Provinsi Riau yang sebelumnya berada di Kota Tanjungpinang, pada tahun 1959 dipindahkan ke Pekanbaru. Secara politik, Kepulauan Riau memang tidak diuntungkan dengan sistem politik yang sentralistik karena orientasi pembangunan hanya terkonsentrasi di Riau Daratan. Sedangkan, Kepulauan Riau tetap terpinggirkan dari hiruk pikuk pembangunan. Namun, berkat upaya yang sungguh-sungguh dari segenap komponen masyarakat Kepulauan Riau, akhirnya pemerintah pusat melalui UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi mengakui berdirinya provinsi ini sebagai provinsi ke-32 di Indonesia.

Berdirinya Provinsi Kepulauan Riau merupakan perjuangan dari seluruh elemen masyarakat Kepulauan Riau, termasuk pemuda. Peranan pemuda dalam pembentukan provinsi ini tidak bisa dinafikan. Secara historis, Badan pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), yang diketuai oleh Huzrin Hood saat itu menggalang kekuatan dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk mengawal dan mengamati proses pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau hingga menjadi UU (<http://effendyalhaji.blogspot.co.id>). Hal ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki andil yang cukup besar dalam sejarah perjuangan pembentukan provinsi ini. Namun, setelah hampir 14 tahun berlalu, dimanakah orang-orang muda Kepulauan Riau tersebut? Fokus tulisan ini membahas kepemimpinan orang muda Kepulauan Riau pasca terbentuknya provinsi ini pada tahun 2002 dari perspektif politik. Dari perspektif politik, kepemimpinan orang muda dalam tulisan ini dibatasi pada

¹ Bahan diskusi Sudut Kampung, dengan tema “Quo Vadis Kepri: Kepemimpinan Orang Muda Kepulauan Riau; Hari Ini untuk Esok”, 22 Mei 2016, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

² Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

kepemimpinan orang-orang muda dalam institusi kekuasaan politik di Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah, apakah orang-orang muda Kepulauan Riau muncul sebagai pemimpin di daerahnya sendiri atau tidak? Jika tidak, apa masalah-masalah yang dihadapi oleh orang muda Kepulauan Riau sehingga mereka tidak muncul ke panggung kekuasaan di provinsi ini?

Mengapa Orang Muda?

Dalam arti luas, pemuda adalah “orang yang masih muda; orang muda: harapan bangsa” (Pusat Bahasa, 2008: 1045). Sedangkan dalam arti sempit, menpemuda dapat didefinisikan sebagai “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun” (pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2009). Dua definisi ini memiliki batasan dan ruang lingkup yang berbeda dalam mendefinisikan pemuda sehingga menimbulkan polemik ketika ditafsirkan pada tataran empiris. Pusat Bahasa cenderung memberikan batasan yang lebih longgar mengenai pemuda. Dalam definisi ini, setiap orang yang masih berusia muda dan memiliki orientasi untuk kemajuan bangsa dapat disebut sebagai pemuda. Namun definisi ini tidak memberikan batasan rentang usia manusia yang dianggap pemuda itu. Hal ini penting mengingat di masyarakat kita, setiap orang yang masih energik dan mempunyai kontribusi bagi orang banyak dianggap sebagai pemuda, meskipun dari sisi usia sudah tidak muda lagi. Generalisasi ini yang melegitimasi orang-orang tua memegang posisi-posisi penting pada organisasi kepemudaan. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan memiliki dua kelemahan penting. *Pertama*, Definisi pemuda dalam UU No. 40 Tahun 2009 jelas bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UU No. 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (pasal 1 ayat 1). *Kedua*, UU No. 40 Tahun 2009 terlalu mempersempit usia pemuda, dari 16 tahun sampai 30 tahun. Kenyataannya, banyak orang yang berusia di atas 30 tahun tetapi memiliki spirit dan semangat untuk memberikan sumbangsih bagi orang lain.

Orang muda memiliki andil yang besar bagi terbentuknya negara bangsa (*nation state*) Indonesia dan berada di garda terdepan dalam panggung sejarah bangsa Indonesia. Dalam lintasan sejarah Indonesia, orang muda memainkan peranan penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat, organisasi kepemudaan yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Budi Utomo yang didirikan oleh pemuda pelajar Jawa pada 20 Mei 1908 (Leifer, 2000: 153). Budi Utomo adalah organisasi pemuda pertama yang berwawasan Indonesia merdeka. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa STOVIA lainnya di Batavia. Sejarah juga mencatat, para pemuda dari seluruh Indonesia menginisiasi Kongres Pemuda tanggal 27-28 Oktober 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda. Gerakan ini menegaskan cita-cita bersama para pemuda saat itu tentang "tanah air Indonesia", "bangsa Indonesia", dan "bahasa Indonesia". Kemudian, pemuda juga terlibat dalam

proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa pemuda antara lain Soekarni, Wikana dan Chaerul Saleh “menculik” Soekarno dan Hatta dan dibawa ke Rengasdengklok, sehari sebelum teks proklamasi dibacakan untuk mempercepat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi pertentangan yang cukup tajam antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Achmad Subarjo mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia dikonsolidasikan dengan Jepang. Sedangkan, golongan muda ingin proklamasi dilaksanakan secepatnya karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Selanjutnya, demonstrasi pemuda-mahasiswa juga yang akhirnya menjatuhkan presiden Soekarno pada tahun 1966. Sedangkan, Soeharto lengser dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998 setelah demonstrasi besar-besaran mahasiswa pada saat itu.

Orang Muda Kepulauan Riau di Kancah Politik

Secara teoritik, politik seringkali didefinisikan sebagai alokasi nilai-nilai (*authoritative allocation of values*) dan proses untuk menentukan “siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana” (Lasswell, 1936; Easton, 1965). Di bidang politik, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini diketahui bahwa orang-orang muda Kepulauan Riau belum memegang jabatan-jabatan penting di level eksekutif daerah. Jabatan-jabatan strategis di Kepulauan Riau, seperti gubernur, bupati, dan walikota masih dikuasai oleh generasi tua. Rata-rata usia pejabat di Kepulauan Riau berusia 52 tahun. Mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2009, usia ini tidak dapat dikategorikan sebagai pemuda. Dominasi generasi tua juga terjadi di lembaga legislatif, yaitu di DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.

Tabel 1. Profil Kepala Daerah di Kepulauan Riau

Daerah	Pejabat	Kelahiran	Usia
Gubernur Kepulauan Riau	Plt. Nurdin Basirun	7 Juli 1957	59 Tahun
Walikota Tanjungpinang	Lis Darmansyah	19 Maret 1970	46 Tahun
Walikota Batam	Muhammad Rudi	20 Oktober 1963	53 Tahun
Bupati Bintan	Apri Sujadi	12 April 1977	39 Tahun
Bupati Lingga	Alias Wello	7 Januari 1963	53 Tahun
Bupati Kep. Anambas	Abdul Haris	1 Mei 1968	48 Tahun
Bupati Natuna	Abdul Hamid Rizal	15 September 1952	64 Tahun
Bupati Karimun	Aunur Rafiq	16 Agustus 1964	54 Tahun

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berbicara tentang kepemimpinan orang muda, berarti juga bicara tentang pemuda. Di Provinsi Kepulauan Riau, baik di level eksekutif maupun di legislatif hampir semua posisi dikuasai oleh laki-laki. Di level eksekutif hanya satu orang perempuan yang berhasil menduduki jabatan politik, yaitu Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, meskipun yang bersangkutan tidak bisa lagi disebut sebagai pemuda karena sudah berusia 52 tahun. Setali tiga uang dengan eksekutif, di level legislatif, mayoritas kursi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau

dikuasai oleh laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau, peran laki-laki pada sektor publik masih terlalu dominan.

Tabel 2. Komposisi Anggota DPRD 2014-2019 di Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin

Daerah	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Jumlah
Kepulauan Riau	39 (87%)	6 (13%)	45
Kota Tanjungpinang	22 (73%)	8 (27%)	30
Kota Batam	47 (94%)	3 (6%)	50
Kabupaten Bintan	21 (84%)	4 (16%)	25
Kabupaten Lingga	19 (95%)	1 (5%)	20
Kabupaten Kep. Anambas	18 (90%)	2 (10%)	20
Kabupaten Natuna	19 (95%)	1 (5%)	20
Kabupaten Karimun	29 (97%)	1 (3%)	30

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Hambatan Struktural dan Kultural

Realitas di atas menunjukkan bahwa orang-orang muda Kepulauan Riau masih terpinggirkan dari pentas politik negerinya. Pertanyaannya, mengapa orang muda Kepulauan Riau belum muncul ke permukaan. Ada berbagai masalah yang menyebabkan minimnya pemimpin-pemimpin muda Kepulauan Riau. Apabila dikategorisasikan, masalah-masalah tersebut disebabkan oleh hambatan struktural dan kultural yang melanda orang-orang muda Kepulauan Riau. Secara struktural ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa orang-orang muda Kepulauan Riau belum bisa muncul ke panggung kekuasaan politik di Kepulauan Riau. *Pertama*, macetnya fungsi kaderisasi politik partai sehingga banyak orang muda potensial yang tidak terjaring oleh partai. Mayoritas partai di Indonesia adalah partai massa sehingga fungsi kaderisasi belum dijalankan secara optimal. *Kedua*, sistem kepartaian yang masih oligarkis-transaksional mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Partai politik kita masih dikuasai oleh kaum oligark yang memiliki modal kapital dan material yang kuat (Winters, 2011). Struktur kepartaian dikuasai oleh segelintir elite dan kelompok-kelompok elite yang berusaha mempertahankan kekuasaan absolutnya. Hal ini yang menyebabkan mengapa orang-orang muda potensial tidak bisa masuk dalam lingkaran dan struktur partai. Sistem politik yang transaksional juga menyebabkan orang-orang muda tidak bisa bersaing dalam pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif. Di Indonesia, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah dan anggota legislatif dari partai politik harus memiliki modal sosial, kapital, dan popularitas yang cukup. *Ketiga*, struktur kebijakan pemerintah daerah yang belum berpihak kepada pemuda. Hal ini ditandai dengan minimnya perhatian pemerintah daerah mengembangkan potensi pemuda. Hal terjadi karena anggaran publik lebih banyak tersedot untuk keperluan birokrasi dan pejabat daerah. Kalaupun ada program dan kegiatan di bidang kepemudaan sifatnya parsial dan terpecah-pecah

pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga serapan dan implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Sedangkan dari sisi kultural, ada dua hambatan yang dihadapi oleh orang-orang muda di Kepulauan Riau. *Pertama*, secara kultural di dalam masyarakat Kepulauan Riau pada khususnya dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya, anak tertua laki-laki dan perempuan (terutama laki-laki) memiliki tanggung-jawab sosial terhadap keluarga. Banyak diantara orang muda yang berkulat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga terlebih dahulu sebelum terjun ke arena publik. Akibatnya, dari sisi usia, banyak diantara mereka yang terlambat masuk ke lembaga-lembaga politik kekuasaan. *Kedua*, karakter orang Melayu Kepulauan Riau yang sangat “menghormati” orang yang lebih tua sehingga ada rasa sungkan untuk bersaing dengan generasi yang lebih tua. Apalagi jika generasi tua tersebut mempunyai kedudukan terhormat dalam struktur sosial masyarakat Melayu Kepulauan Riau.

Referensi

Easton, D. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Willey.

Lasswell, H. 1936. *Politics: Who Gets What, When, How?* New York: McGraw-Hill.

Leifer, M. 2000. The Changing Temper of Indonesian Nationalism in M. Leifer. *Asian Nationalism: China, Taiwan, Japan, India, Pakistan, Indonesia, The Philippines* (pp. 153-169). London: Routledge.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Winters, J. 2011. *Oligarki, Terjemahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumber dari Internet

<http://effendyalhaji.blogspot.co.id/2012/03/sejarah-pembentukan-provinsi-kepulauan.html> diunduh tanggal 15 Mei 2015.